POHON KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Terwujudnya pemari DPD RI sesuai aspirasi daerah

Pelaksanaan tugas responsibel dan daerah yang mandiri pada DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RI (K.1) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI dan RUU Usul Perseorangan yang ditindaklanjuti oleh RUU Usul Parsemarind atau DPR (S.1) Nilai kualitas RUU Usul Perseorangan yang ditindaklanjuti (S.2) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU Usul Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.3)

Meningkatnya kualitas pengawasan (K.2) Nilai kualitas hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh DPD RI dan Nilai kualitas hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Parsemarind atau DPR yang ditindaklanjuti (S.4) Nilai kualitas pengawasan atas Otonomi daerah dan Pajak Daerah (S.5) Nilai kualitas hasil pengawasan atas Otonomi daerah dan Pajak Daerah yang ditindaklanjuti (S.6)

Terwujudnya publik tata kelola DPD RI yang efektif (K.3) Nilai Reformasi Birokrasi DPD (S.7)

PK Kaderisasi Anggota DPD RI yang Berkualitas

PK Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang Prima

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang ditindaklanjuti DPR RI (K.1.1) Nilai kualitas dokumen hasil sinkronisasi RUU Usul Perseorangan yang ditindaklanjuti oleh Komisi DPR (S.1.1)

Meningkatnya kualitas pendapat dan pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR (K.1.2) Nilai kualitas dokumen hasil pendapat dan pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR yang ditindaklanjuti (S.1.2) Nilai kualitas dokumen Hasil Pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR yang ditindaklanjuti (S.1.3)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Perseorangan (K.1.3) (K.1.3) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.4) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.5)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.4) (K.1.4) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.6) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.7)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU (K.2.1) Nilai kualitas dokumen hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh DPD RI (S.1.8) Nilai kualitas dokumen hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh ESDMDA (S.1.9)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.2) (K.2.2) Nilai kualitas dokumen hasil pendapat atas pelaksanaan UU oleh ESDMDA (S.1.10) Nilai kualitas dokumen hasil pendapat atas pelaksanaan UU oleh ESDMDA (S.1.11)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.3) (K.2.3) Nilai kualitas dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.12)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.4) (K.2.4) Nilai kualitas dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.13)

Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI (K.3) (K.3) Nilai RB Kanwil (S.1.14)

Meningkatnya efektivitas sistem dan tata kelola Sekjen DPD RI (K.3.1) Nilai capaian RB Sekjen (S.1.15) Nilai capaian RB Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga (S.1.16) Nilai capaian RB Biro Umum (S.1.17) Nilai capaian RB Biro Keuangan (S.1.18) Nilai capaian RB Biro Hukum (S.1.19) Nilai capaian RB Biro Humas dan Informasi publik (S.1.20) Nilai capaian RB Biro Sumber Daya Manusia (S.1.21) Nilai capaian RB Biro Sarana dan Prasarana (S.1.22) Nilai capaian RB pengawasan internal (S.1.23) Nilai capaian RB pengawasan eksternal (S.1.24)

Meningkatnya nilai akuntabilitas pemerintah/akuntabilitas kinerja pemerintah (K.3.2) Nilai RB Sekretariat (S.1.25)

PK Dalam Lily Kinerja Tetap

PK Dalam Lily Kinerja Tetap

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (K.1.1) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU usul inisiatif yang dibutuhkan (S.1.1)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk RUU usul Parsemarind atau DPR (K.1.2) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU usul Parsemarind atau DPR yang dibutuhkan (S.1.2)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pendapat dan pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR (K.1.3) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Usul Parsemarind atau DPR yang dibutuhkan (S.1.3)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan (K.1.4) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.4)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.5) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.5)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.6) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.6)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.7) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.7)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.1) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.8)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.2) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.9)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.3) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.10)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.4) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.11)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.5) Nilai ketersediaan dokumen bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.12)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.6) Nilai ketersediaan dokumen bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.13)

Meningkatnya efektivitas sistem dan tata kelola Sekjen DPD RI (K.3.1) Nilai capaian RB Sekjen (S.1.14) Nilai capaian RB Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga (S.1.15) Nilai capaian RB Biro Umum (S.1.16) Nilai capaian RB Biro Keuangan (S.1.17) Nilai capaian RB Biro Hukum (S.1.18) Nilai capaian RB Biro Humas dan Informasi publik (S.1.19) Nilai capaian RB Biro Sumber Daya Manusia (S.1.20) Nilai capaian RB Biro Sarana dan Prasarana (S.1.21) Nilai capaian RB pengawasan internal (S.1.22) Nilai capaian RB pengawasan eksternal (S.1.23)

Meningkatnya kualitas consc untuk mengurus, mendjaga dan mengelola pemnagatan tata kelola pemerintah yang baik (K.3.2) Nilai RB Sekretariat (S.1.24) Nilai capaian RB Biro Umum (S.1.25) Nilai capaian RB Biro Keuangan (S.1.26)

PK Kaderisasi Anggota DPD RI yang Berkualitas

PK Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang Prima

Terlaksanaanya kualitas konsultasi dan daerah yang berkualitas untuk legislasi (K.1.1) (K.1.1) ESDMDA yang bergerak DPD RI, (S.1.1) ESDMDA dan Nasta DPD RI, (S.1.2) Persentase Rekomendasi hasil kunjungan kerja anggota DPD RI yang ditindaklanjuti oleh Komisi dan Kementerian/Lembaga (S.1.3) Kunjungan Kerja (S.1.4)

Terlaksanaanya hasil analisis bahan legislasi (Akademik usulan dokumen usulan legislasi) (K.1.2) (K.1.2) Hasil analisis bahan legislasi (Akademik usulan dokumen usulan legislasi) (S.1.5) Persentase hasil analisis bahan legislasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.6) Persentase hasil analisis bahan legislasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.7)

Terlaksanaanya kunjuan konsultasi (K.1.3) (K.1.3) Jaring Hal Lain yang Kita dengan Kunjuan konsultasi (S.1.8) Kunjuan konsultasi (S.1.9)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.1) (K.2.1) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.10) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.11)

Terlaksanaanya hasil analisis bahan pelaksanaan UU (K.2.2) (K.2.2) Hasil analisis bahan pelaksanaan UU (S.1.12) Persentase hasil analisis bahan pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.13) Persentase hasil analisis bahan pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.14)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.3) (K.2.3) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.15) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.16)

Terlaksanaanya hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan (K.2.4) (K.2.4) Hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan (S.1.17) Persentase hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.18) Persentase hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.19)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.5) (K.2.5) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.20) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.21)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.6) (K.2.6) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.22) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.23)

Terwujudnya sl yang pengawasan atas pelaksanaan UU (K.2.7) (K.2.7) Laporan Laporan (S.1.24) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.25) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.26)

Terlaksanaanya laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (K.2.8) (K.2.8) Laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (S.1.27) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.28) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.29)

Terlaksanaanya pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (K.2.9) (K.2.9) Laporan hasil pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (S.1.30) Identifikasi dan penentuan regulasi yang akan dibuat oleh Komisi dan Kementerian/Lembaga (S.1.31)

Terlaksanaanya hasil pendata (Inventarisasi Pendapat) (K.2.10) (K.2.10) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.32) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.33)

Terlaksanaanya pengaduan Konsultasi Keluhan dan Saran yang dapat ditindaklanjuti (K.2.11) (K.2.11) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.34) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.35)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.12) (K.2.12) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.36) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.37)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.13) (K.2.13) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.38) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.39)

Terlaksanaanya sistem informasi dan Pengelolaan Data (K.3.1) (K.3.1) Sistem Informasi dan Pengelolaan Data (S.1.40) Persentase proyeksi pengelolaan data (S.1.41) Persentase proyeksi pengelolaan data (S.1.42)

Terlaksanaanya Monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (K.3.2) (K.3.2) Monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.43) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.44) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.45)

Terlaksanaanya ESDMDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (K.3.3) (K.3.3) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.46) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.47)

Terlaksanaanya hasil pendata (Inventarisasi Pendapat) (K.3.4) (K.3.4) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.48) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.49)

Terlaksanaanya pengaduan Konsultasi Keluhan dan Saran yang dapat ditindaklanjuti (K.3.5) (K.3.5) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.50) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.51)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.6) (K.3.6) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.52) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.53)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.7) (K.3.7) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.54) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.55)

Terlaksanaanya sl yang pengawasan atas pelaksanaan UU (K.3.8) (K.3.8) Laporan (S.1.56) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.57) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.58)

Terlaksanaanya laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (K.3.9) (K.3.9) Laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (S.1.59) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.60) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.61)

Terlaksanaanya pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (K.3.10) (K.3.10) Laporan hasil pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (S.1.62) Identifikasi dan penentuan regulasi yang akan dibuat oleh Komisi dan Kementerian/Lembaga (S.1.63)

Terlaksanaanya hasil pendata (Inventarisasi Pendapat) (K.3.11) (K.3.11) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.64) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.65)

Terlaksanaanya pengaduan Konsultasi Keluhan dan Saran yang dapat ditindaklanjuti (K.3.12) (K.3.12) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.66) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.67)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.13) (K.3.13) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.68) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.69)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.14) (K.3.14) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.70) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.71)

Terlaksanaanya pengelolaan Sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (K.3.15) (K.3.15) Pengelolaan sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (S.1.72)

Terlaksanaanya pengelolaan sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (K.3.16) (K.3.16) Pengelolaan sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (S.1.73)

Terlaksanaanya pengawasan internal yang berkualitas (K.3.17) (K.3.17) Hasil pengawasan internal yang berkualitas (S.1.74) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.75) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.76) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.77)

Terlaksanaanya pengawasan eksternal yang berkualitas (K.3.18) (K.3.18) Hasil pengawasan eksternal yang berkualitas (S.1.78) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.79) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.80) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.81)

Output

Output

POHON KINERJA
DEPUTI PERSIDANGAN DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I.a / Kinerja Strategis

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU usulan DPD (Kualitas DIM) (PL_1) ; 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (L_1); 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (L_2); 4) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (L_3)

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas tindak penyampaian sesuai ASAMIDA (S_1) ; 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA (S_2) ; 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASAMIDA (S_3)

PK Eselon I.a/ Kinerja Taktis

Meningkatnya kualitas inisiatif yang dituntaskan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (P_{L1}) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU (P_{L2})

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{L1}) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{L2})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (P_{L1}) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (P_{L2})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{L1}) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{L2})

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA (P_{S1}) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA (P_{S2})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan untuk untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA (P_{S1}) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA (P_{S2})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASAMIDA (P_{S1}) ; 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASAMIDA (P_{S2})

PK Eselon II/ Kinerja Operasional

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L1})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L2})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L1})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L2})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L1})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L2})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L1})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang dibutuhkan (K_{L2})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar yang dibutuhkan (K_{S1})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar yang dibutuhkan (K_{S2}) ; 2) Nilai tertimbang mewakili terhadap RUU usulan DPD, RUU usulan pemerintah atau DPR, mendukung atas RUU Usul pemerintah atau DPR, mendukung atas pandudukan belajarkan Pemerintah (KOLL) ; 3) Nilai tertimbang mewakili terhadap RUU usulan DPD, RUU usulan pemerintah atau DPR, mendukung atas RUU Usul pemerintah atau DPR, mendukung atas pandudukan belajarkan Pemerintah (KOLL) ; 4) Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI (K_{S2}) ; 4) Indeks kepuasan publik (IKP) ; 5) Nilai tertimbang pengaplikasian konsultasi/pengaduan dan bejasanya parlemen DPD RI (K_{S2})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan penirjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atau tabulasi ASAMIDA untuk pemantauan dan penirjauan sesuai standar yang dibutuhkan (K_{P1})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan penirjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai tertimbang mewakili terhadap RUU usulan pemerintah atau pemantauan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU (K_{P2}) 2) Nilai tertimbang dukungan atas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya (K_{P2})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai tertimbang usulan pemerintah dari daerah yang bertempur sesuai standar yang dibutuhkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang dibutuhkan (K_{P1})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASAMIDA
IK : 1) Nilai tertimbang usulan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang dibutuhkan (K_{P2}) 2) Nilai tertimbang mewakili untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (K_{P2})

Output

Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU
IK : 1) ASAMIDA oleh Anggota DPD RI, 2) Aktivitas Anggota DPD RI, 3) Dengarpitan dalam rangka, 4) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 5) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpengaran, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Pendapat NA oleh Tim Perumus

Tersusunnya rumusan rancangan UU
IK : 1) 18 sehh NA dan draft. RUU dengan hubungan otoderna, 2) Pendapat RUU

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ASAMIDA untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Pengajuhan data aspirasi, 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpengaran, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Pendapat oleh tim perumus

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ASAMIDA untuk Pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Pengajuhan data aspirasi, 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Kajian BKF, 2) Kajian KEM – PPKF, 3) Kajian RUU APBN, 4) Kajian DPRAN, 5) Kajian BPSPM, 6) Kajian APBN-P, 7) Finalisasi penyusunan kajian dari Anggota DPD RI

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ASAMIDA untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Pengajuhan data aspirasi, 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpengaran, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ASAMIDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Tabulasi ASAMIDA atas pelaksanaan UU terkenta, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASAMIDA pelaksanaan UU terkenta

Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Penelusuran reparasi, 2) Pendahuluan mekilat FGD, dll, 3) Perumusan finalisasi hasil pengawasan kapangan

Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalam Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/ Perpres/ Keppres/ SOP/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis atau usulan perubahan RUU

Tersampaikannya hasil produk hukum DPD RI
IK : 1) Perumusan hasil atas pelaksanaan usulan/ideal, dialog, FGD hasil produk hukum DPD RI, 2) Identifikasi dan pemetaan negatif, simpulan dari dampakat akurasi dan pangusulan solusi-nasional

Terlaksananya pengelolaan kerumah tanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI
IK : 1) Perumusan hasil atas pengelolaan dan kerjasama parlemen DPD RI

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ASAMIDA Pemantauan dan penirjauan
IK : 1) Tabulasi ASAMIDA atas pelaksanaan UU terkenta, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASAMIDA pelaksanaan UU terkenta

Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan penirjauan terhadap pelaksanaan UU
IK : 1) Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil ASAMIDA, 2) Finalisasi RUU Inisiatif DPD RI

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya
IK : 1) Kajian dampak atas pelaksanaan UU, 2) Perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD RI

Terhimpunnya ASAMIDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan
IK : 1) Dengarpitan hm pendukung dalam rangka pemantauan dan evaluasi berdasarkan semesta berencana, 2) Kajian terkait dengan hubungan dari Anggota maupun Badan Daerah, 2) Pendabahan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda ; 3) Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
IK : 1) Kajian penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 2) Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah
IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah, 2) Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah

POHON KINERJA
DEPUTI ADMINISTRASI DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif
IK : 1) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) (S_{ss})

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I.a / Kinerja Strategis

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I.a / Kinerja Strategis

Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI
IK : Nilai RB General (P_{ss})

Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah
IK : Nilai RB Tematik (P_{ss})

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

Meningkatnya efektifitas sistem dan tata kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capaian RB pengelolaan organisasi (K_{ss}), 2) Nilai capaian RB pengelolaan SDM (K_{ss}), 3) Nilai capaian RB pengelolaan kinerja (K_{ss}), 4) Nilai capaian RB pengelolaan keuangan (K_{ss}), 5) Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan (K_{ss}), 6) Nilai capaian RB pelayanan informasi publik (K_{ss}), 7) Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan (K_{ss}), 8) Nilai capaian RB pengelolaan layanan umum, sarana prasana di kantor pusat (K_{ss}), 9) Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di kantor ibukota provinsi (K_{ss}), 10) Nilai capaian RB pengawasan Internal (K_{ss})

Meningkatnya kualitas upaya untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemrintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat (K_{ss})

PK Eselon II / Kinerja Operasional

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsi
IK : 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General, 2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General, 3) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, 4) Indeks Pelayanan Publik, 5) Indeks Kualitas Kebijakan, 6) Survei Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia yang profesional
IK : 1) Indeks sistem merit, 2) Indeks berAKHLAK

Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas
IK : 1) Nilai SAKIP, 2) Indeks perencanaan pembangunan nasional (IPPN)

Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
IK : 1) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 2) Opini BPK

Terlaksananya pengelolaan prioritas nasional
IK : 1) Capaian Prioritas Nasional, 2) Capaian IKU Kementerian/Lembaga

Terlaksananya digitalisasi tata kelola pemerintahan
IK : 1) Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik/Tingkat implementasi kebijakan arsitektur pemerintahan digital, 2) Tingkat digitalisasi arsip, 3) Indeks pembangunan statistik, 4) Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital

Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif
IK : 1) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan, 2) Indeks pelayanan publik

Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif di daerah pemilihan
IK : 1) Indeks pelayanan publik di kantor daerah

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di Ibukota Negara
IK : 1) Indeks pengelolaan aset,

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di Ibukota provinsi
IK : 1) Indeks tata kelola pengadaan

Terlaksananya pengawasan internal yang independen
IK : 1) Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), 2) Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas (ZI), 3) Tingkat tindak lanjut rekomendasi, 4) Survei penilaian integritas

Terlaksananya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Pengentasan kemiskinan / Peningkatan kemiskinan, 2) Realisasi investasi / Peningkatan Investasi, 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus penanganan stunting/Digitalisasi administrasi pemerintahan, 4) Penguatan produk dalam negeri / Pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi, 5) Laju inflasi/Percepatan prioritas aktual presiden

Output

Output

POHON KINERJA
BIRO PERSIDANGAN I DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : 1 Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang masuk produk DPD RI

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I a / Kinerja Strategis

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU usulan DPD (Kualitas DIM) (K_1) ; 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (L_1); 3) Nilai kualitas partisipasi atas RUU mengenai ASEAN (L_2); 4) Nilai kualitas partisipasi atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (L_3)

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA (S_1); 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (S_2); 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (S_3)

PK Eselon Ia/ Kinerja Taktis

Meningkatnya kualitas RUU insiatif yang dhasilkan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU ($P_{1.1}$) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU ($P_{1.2}$)

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{2.1}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{2.2}$)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{3.1}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{3.2}$)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($P_{4.1}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($P_{4.2}$)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($P_{5.1}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($P_{5.2}$)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA ($P_{6.1}$); 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA ($P_{6.2}$)

PK Eselon Ib/ Kinerja Taktis

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan ($L_{1.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan ($L_{2.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk ai (= nilai-nilai atas pelaksanaan UU 2010), 2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI atas pelaksanaan UU sesuai atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (KOLL), 3) Nilai tertimbang bagaiton sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI ($P_{4.2.1}$), 4) Indeks kinerja Pansus DPD RI ($P_{4.2.2}$), 5) Indeks kinerja pengaktifan kesiruntuhanagaan dan keijasama parlemen DPD RI ($P_{4.2.3}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang masukan publik sesuai standar atas Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan ($P_{6.2.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang berfungsi sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan ($P_{6.1.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan ($P_{6.2.1}$); 2) Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah ($P_{6.2.2}$)

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Tersusunnya rumusan rancangan UU
IK : 1) 18 sshh NA dan draft RUU dengan kulaorgan ahedemis, 2) Predoun RUU

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebiatanagaraan, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Predoun oleh tim perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebiatanagaraan, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Predoun oleh tim perumus

Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Penetapan responn, 2) Pendahuluan metdol FGD, dll, 3) Perumusan finalosi hasil pengawasan bagangan

Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau usulan perubahan RUU

Terlaksananya pengelolaan kerumah tanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI
IK : 1) Perumusan hasil atau pengelolaan dan kerjasama parlemen DPD RI

Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU
IK : 1) Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil ASMASDA, 2) Penetapan RUU Inisiatif DPD RI

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya
IK : 1) Kajian dampak atas pelaksanaan UU, 2) Perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD RI

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan
IK : 1) Dwipdapsin hm pandukung dalam rangka penentuan dan evaluasi berdasarkan semesta dengan Komisi, 2) Dwipdapsin hm pendukung bersumber dari Anggota maupun Bantar Daerah, 2) Pendoebahan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda ; 3) Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah IK : 1) Kajian penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 2) Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah.
IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah, 2) Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah

Output

POHON KINERJA
BIRO PERSIDANGAN II DPD RI

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I a / Kinerja Strategis

PK Eselon I/a/ Kinerja Taktis

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Output

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : 1) Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang tampak produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU usul inisiatif dan usulan DIPD (KL) ; 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (L_1); 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (L_2); 4) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (L_3)

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas laporan pengawasan sesuai ASMASDA (L_4); 2) Nilai kualitas bahan hasil pengawasan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (L_5); 3) Nilai kualitas bahan hasil pemantauan dan evaluasi atas Kinerja dan Perda sesuai ASMASDA (L_6)

Meningkatnya kualitas RUU insiatif yang diajukan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (P_{L1}) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU (P_{L2})

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{L3}); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{L4})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (L_{L1}); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (L_{L2})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{L1}); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{L2})

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{M1}); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{M2})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (P_{L2})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (P_{L4})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (L_{L2})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (P_{L2})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk a) Integrasi data pelaksanaan UU (KO22), 2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU usul inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (KO22), 3) Nilai tertimbang bagaiton rondaluo, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI (P_{M2}), 4) Indeks kualitas dukungan ahli dalam mendukung pengaplikasian kecurahfungsiangan dan keijasama parlemen DPD RI (P_{M2})

Tersusunnya rumusan rancangan UU
IK : 1) 18 sehh NA dan draft, RUU dengan kulonpan ekademis, 2) Finalisasi RUU

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpraxian, 2) Analisis RIA dan BOCCERI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Kajian BMP, 2) Kajian KEM – PPKF; 3) Kajian RUU APBN, 4) Kajian BPIMN, 5) Kajian BPIPM, 6) Kajian APBN-P; 7) Finalisasi penurunan kajian oleh Anggota DPD RI

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpraxian, 2) Analisis RIA dan BOCCERI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Pemaparan reparan, 2) Pemdahasan maklisi FGD, dll; 3) Perumusan finalisasi hasil pengawasan bapanger

Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Umum, Partai Politik, Pemilukada, Peraturan Tatib atau usulan perubahan RUU

Terlaksananya pengelolaan kerumah tanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI
IK : 1) Penurunan hasil atas pengelolaan dan kerjasama parlemen DPD RI

POHON KINERJA
BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN DPD RI

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I a / Kinerja Strategis

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Output

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah

M : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang tampak produk DPD RI

Meningkatnya kualitas pengawasan

M : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA ($I_{1.1}$) 2) Nilai kualitas bentuk tindak lanjut hasil pemantauan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($I_{1.2}$) 3) Nilai kualitas bentuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Kinerja/Ko dan Perda sesuai ASMASDA ($I_{1.3}$)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU

M : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU hasil pengawasan ($I_{1.1.1}$) 2) Nilai kualitas dukungan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($I_{1.1.2}$)

Meningkatnya kualitas dukungan kesahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

M : 1) Nilai kualitas dukungan ui petik sesuai dondor atas pelaksanaan UU (DOUP), 2) Nilai tertimbang monuhan terhadap RUU sesuai ASMASDA, 3) Nilai tertimbang monuhan atas RUU Usul pemerintah atau DPR, monuhan atas pandahan kebijakan Pemerintah (KOUU), 3) Nilai tertimbang kegatian sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI ($I_{1.1.2.1}$) 4) Indeks kepuasan publik atas produk hukum dan pengaplikasian kesrumtifkanggun dan kesiswaran parlemen DPD RI ($I_{1.1.2.2}$)

Tersampaikannya hasil produk hukum DPD RI

M : 1) Dirumusan hasil atas pelaksanaan sosialisasi, dialog, FGD hasil produk hukum DPD RI, 2) Identifikasi dan pemetaan regulasi, monuhan dan dimapatkan aturan dan pengaplikasian aturan-aturan

POHON KINERJA
PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU usulan DPD RI (usulan DPD) (X_1) ; 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (X_2); 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (X_3); 4) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (X_4)

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMAKDA (X_5) ; 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA (X_6) ; 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA (X_7)

PK Pimpinan Lembaga / Eselon Ia / Kinerja Strategis

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU ($P_{1.1}$) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU ($P_{1.2}$)

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{1.3}$) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{1.4}$)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ($P_{1.5}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ($P_{1.6}$)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{1.7}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{1.8}$)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.9}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.10}$)

Meningkatnya kualitas tindaklanjut atas hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.11}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.12}$)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA ($P_{1.13}$) 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA ($P_{1.14}$)

PK Eselon Ib/ Kinerja Taktis

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan($K_{1.2}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.3}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.4}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.5}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi ASMAKDA untuk pemantauan dan pentinjauan sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.6}$)

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU
IK : 1) ASMAKDA oleh Anggota DPD RI; 2) ASMAKDA oleh Kaban DPD RI; 3) Pengajuan data aspirasi; 4) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 5) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Pengajuan data aspirasi; 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 3) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk Pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Pengajuan data aspirasi; 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 3) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Pengajuan data aspirasi; 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 3) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Tabulasi ASMAKDA atas pelaksanaan UU terkenal; 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASMAKDA pelaksanaan UU terkenal

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk Pemantauan dan pentinjauan
IK : 1) Tabulasi ASMAKDA atas pelaksanaan UU terkenal; 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASMAKDA pelaksanaan UU terkenal

Output

POHON KINERJA
PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : 1) Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang termuat produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU usulan DPD RI (Kualitas DIM) (X_1) ; 2) Nilai kualitas pendapatan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (X_2); 3) Nilai kualitas partisipasinya atas RUU mengenai ASEAN (X_3); 4) Nilai kualitas partisipasinya atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (X_4)

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas tindak pengawasan sesuai ASAMASDA (X_5); 2) Nilai kualitasi tindak lanjut hasil pemantauan dan partisipasin terhadap pelaksanaan UU sesuai ASAMASDA (X_6); 3) Nilai kualitasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASAMASDA (X_7)

PK Pimpinan Lembaga / Eselon Ia / Kinerja Strategis

Meningkatnya kualitas RUU insiatif yang diusulkan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU ($P_{1.1}$) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU ($P_{1.2}$)

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{1.3}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{1.4}$)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{1.5}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{1.6}$)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASAMASDA ($P_{2.1}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASAMASDA ($P_{2.2}$)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($P_{2.3}$); 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ($P_{2.4}$)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMASDA ($P_{2.5}$); 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMASDA ($P_{2.6}$)

PK Eselon IIa/ Kinerja Taktis

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai terbimbing dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang dibetapkan($K_{1.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai terbimbing dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang dibetapkan ($K_{1.2}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai terbimbing dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang dibetapkan ($K_{1.3}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai terbimbing dukungan ad pelik sesuai standar atas 3 (tiga) topik atas pelaksanaan UU (KOLEG); 2) Nilai terbimbing masukan terhadap RUU insiatif DPD RI atas pelaksanaan UU sesuai atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (KOLEG); 3) Nilai terbimbing bagaiton notulensi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI ($K_{1.4}$); 4) Indeks Efektifitas dan pemaktian regulasi, mmpaktasi dan dimanfaat akurasi dan pengaplikasian keacuraffanggunan dan keijasanna yaoteman DPD RI ($K_{1.5}$)

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pemisipasan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai terbimbing masukan ad pelik terhadap RUU insiatif untuk pemantauan dan partisipasin terhadap pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya ($K_{1.6}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai terbimbing aspirasi masyarakat dan daerah yang terfiksasi sesuai standar yang dibetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Renperda dan Perda sesuai dengan standar yang dibetapkan($K_{1.7}$)

PK Eselon IIb/ Kinerja Operasional

Tersusunya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU
IK : 1) Rujkan sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpraxisan, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Finalisasi naka oleh Tim Perumus

Tersusunya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Rujkan sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpraxisan, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Finalisasi naka oleh Tim perumus

Tersusunya hasil analisa kajian sesuai standar untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Rujkan sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan kebutuhanpraxisan, 2) Analisis RIA dan BOCCER, 3) Finalisasi naka oleh tim perumus

Tersusunya bahan masukan terhadap RUU insiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau usulan perubahan RUU

Tersampaikannya hasil produk hukum DPD RI
IK : 1) Dirumuskan hasil atsa pelaksanaan notulensi, dialog, FGD hasil produk hukum DPD RI; 2) Identifikasi dan pemaktian regulasi, mmpaktasi dan dimanfaat akurasi dan pengaplikasian keacuraffanggunan

Tersedianya masukan terhadap RUU insiatif untuk pemantauan dan partisipasin terhadap pelaksanaan UU
IK : 1) Usulan RUU Insiatif sesuai dengan hasil ASMASDA, 2) Penetapan RUU insiatif DPD RI

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan
IK : 1) Penyelesaian tim pendukung dalam rangka penyusunan dan evaluasi berdasarkan semesta pemantau, 2) Tim Ahli dan Tim Ahli yang bekerjasama dari Anggota maupun Bantar Daerah, 2) Pendokumen hasil pemantauan dan evaluasi Renperda dan Perda, 3) Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Renperda dan Perda

PK Eselon IIc/ Kinerja Taktis

PK Eselon IIc/ Kinerja Operasional

Output

Output

POHON KINERJA
BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DPD RI

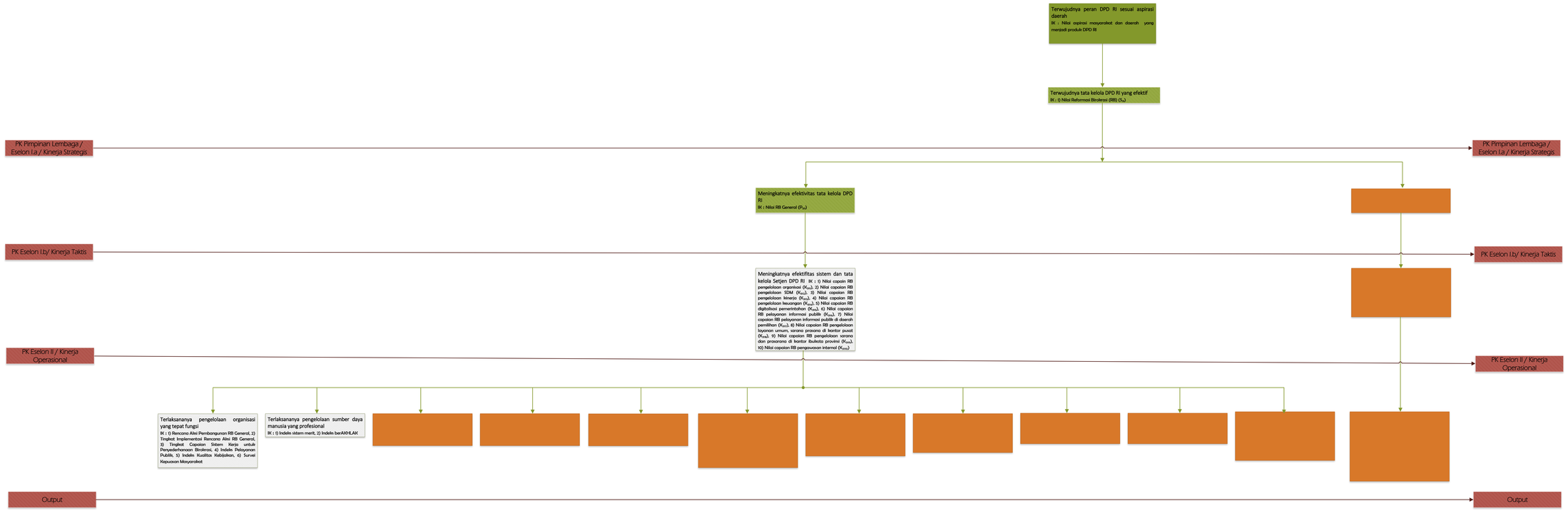

POHON KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPD RI

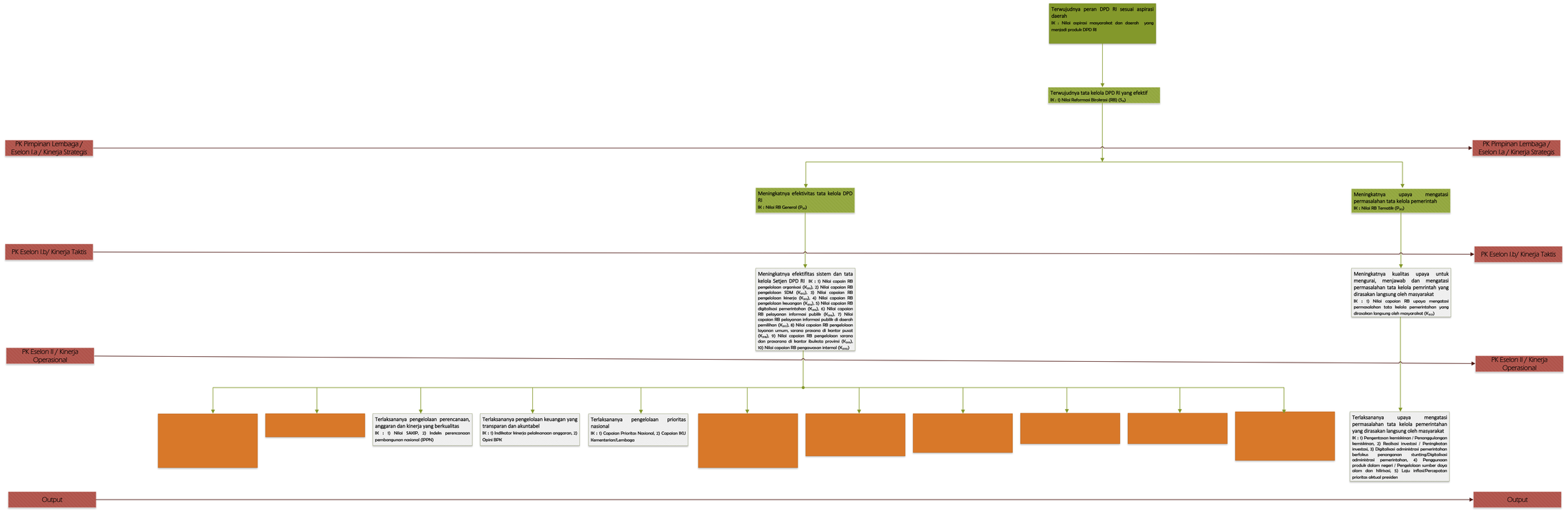

POHON KINERJA
BIRO SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI DPD RI

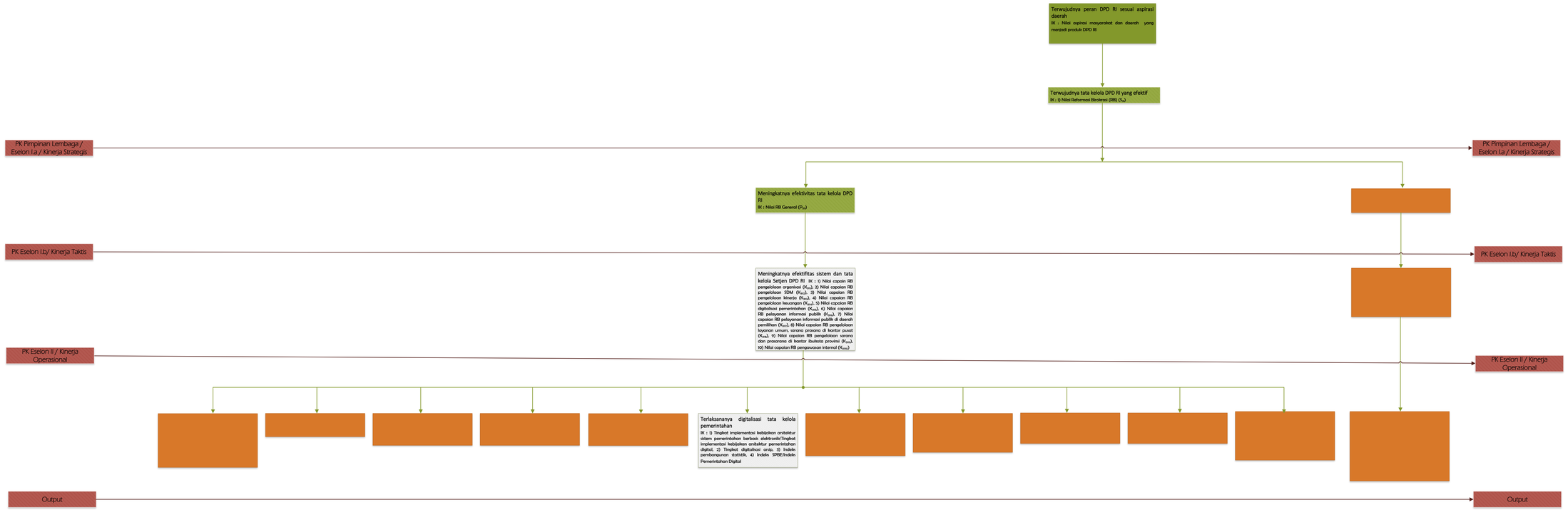

POHON KINERJA
BIRO PROTOKOL, HUMAS DAN MEDIA DPD RI

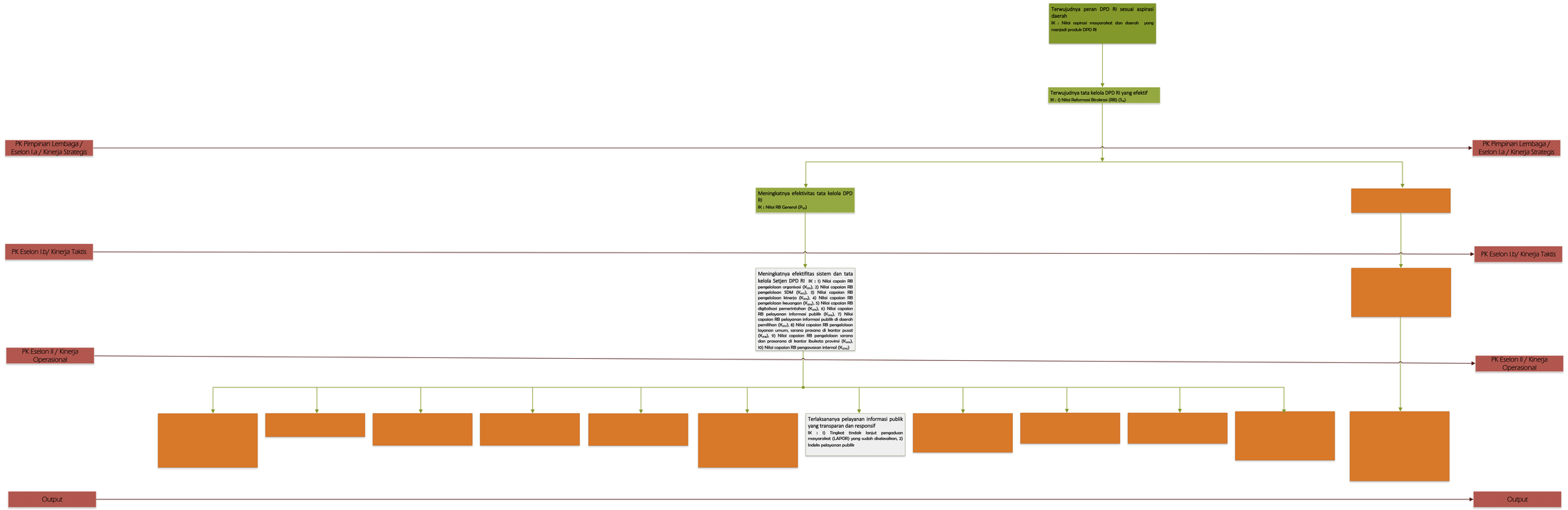

POHON KINERJA
BIRO UMUM DPD RI

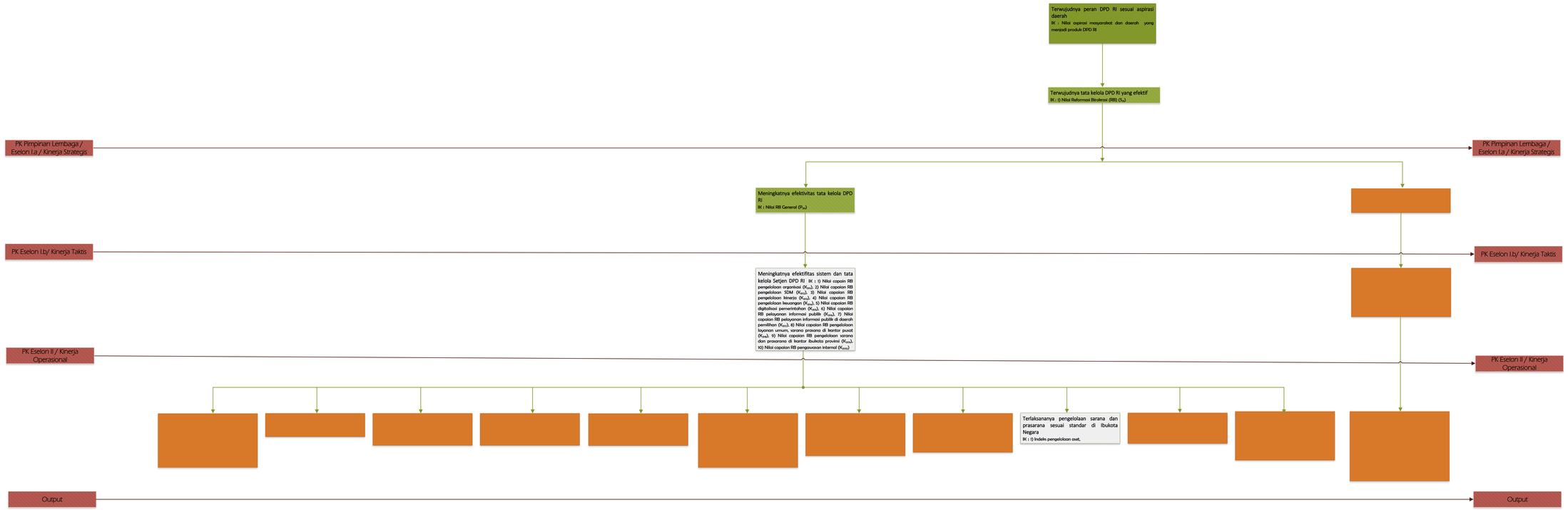

POHON KINERJA
INSPEKTORAT DPD RI

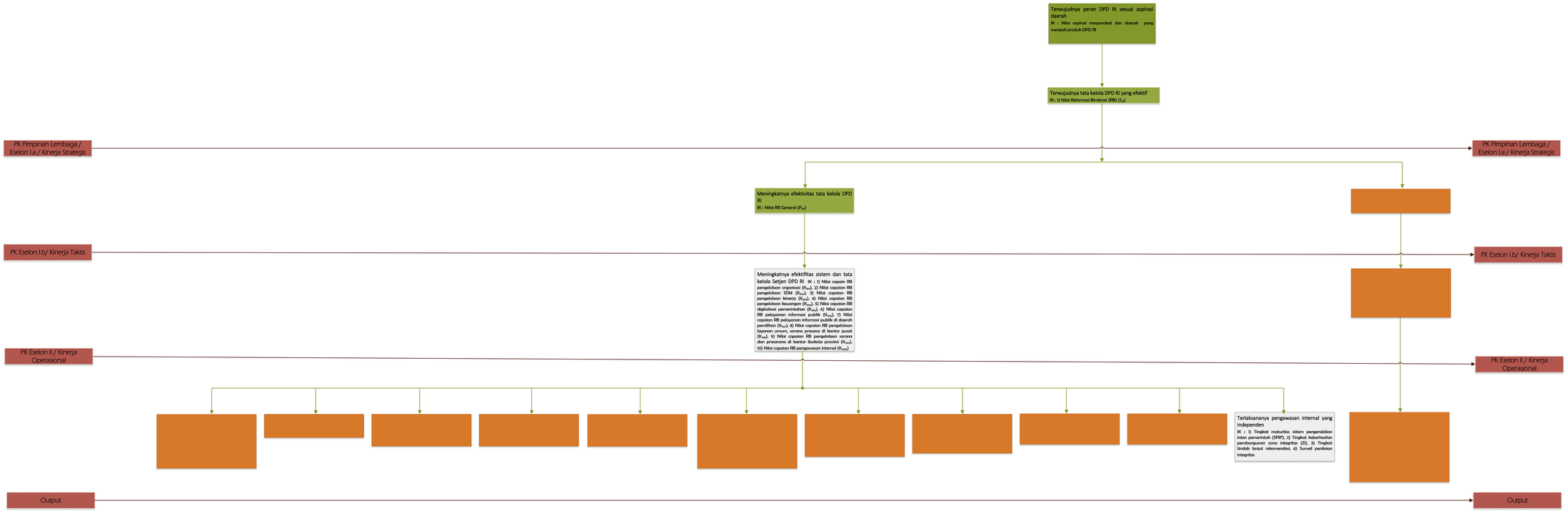

POHON KINERJA
KANTOR DPD RI DI BEACOKA PROVINSI

Meningkatnya peran DPD RI sebagai legislasi dan APBN
IG 1 Meningkatnya aspirasi masyarakat dan daerah yang terwadahi oleh DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RI.01
IK 1 Nilai kualitas RUU usulan pada Prolegnas DPR RI yang dihasilkan oleh Komite I dan Komite III dan Panpemda atau DPR RI. IK 1 Nilai kualitas RUU usulan pada Prolegnas DPR RI. IK 2 Nilai kualitas pertimbangan atas RUU APBN dan RUU Pajak dan Pajak Daerah dan Pajak Daerah dan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dan Pajak Pusat